

DINAMIKA POLITIK INDONESIA DALAM PERJUANGAN DIPLOMASI PEMBEBASAN IRIAN BARAT, 1949-1963

Oleh: Karseno
Arsip Nasional Republik Indonesia
yety.kartika@yahoo.com

ABSTRACT

Indonesian political strategy in the context of struggling for liberation of West Irian is a real evidence of the success of the country against colonialism and imperialism. The long process of this diplomatic struggle was run through many domestic political disturbances and had a great effect on her international diplomatic policy in the context of Cold War. The research was conducted as critical history writing method, based on some textual literatures, documents, and archives. The process of liberation had some influences on the instability of Parlemtent, the cancellation of Uni/Round Table Conference, the nationalization of Dutch private companies, and the implementation of Tri Komando Rakyat. However, internationally, Indonesia had a chance to mobilize international supports through Asia Africa Conference and the United Nations. However, many Indonesian's efforts failed, and West Irian was overpowered by the Dutch and Western powers. It was also weighted by the USA political position. Therefore, Sukarno regime's policy related to the polarization of two superpowers, USA and Soviet Union.

Key Words: *political struggle, colonialism, imperialism*

I. PENDAHULUAN

Sejarah perjuangan pembebasan Irian Barat kembali ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak bisa dipisahkan dari dinamika politik nasional Indonesia. Proses panjang untuk membebaskan Irian Barat dari kekuasaan Belanda, telah mengerahkan segenap potensi negara yang tidak sedikit. Juga perjuangan diplomasi yang melibatkan berbagai unsur internasional telah memberikan andil untuk mengantarkan keberhasilan pemerintah Indonesia dalam membebaskan Irian Barat. Secara prinsip yang menjadi faktor penentu dalam pembebasan Irian Barat adalah perjuangan diplomasi yang dipadukan dengan kekuatan militer.¹ Selain itu berkaitan dengan konteks sejarah modern, perjuangan pembebasan Irian Barat tidak lepas dari pengaruh konflik Perang Dingin antara ideologi Barat (kapitalis) dengan ideologi Timur (komunis). Hal ini antara lain tampak ketika pengerahan kekuatan militer dalam Tri Komando

Rakyat (Tri Komando) pembebasan Irian Barat, Indonesia mengandalkan persenjataan perang dari Blok Timur (Uni Soviet), dan hal itu mencemaskan Blok Barat (Amerika Serikat) akan bahaya komunis di Asia Tenggara.² Dengan tekanan Amerika Serikat, Belanda akhirnya mau menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia lewat perantara Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).³

Masalah konflik Irian Barat, yang muncul setelah Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) Tahun 1949 menjadi menu utama dalam hubungan diplomatik antara Indonesia-Belanda sampai ketika pembebasan wilayah itu Tahun 1963. Ada masalah yang sangat krusial dari hasil yang diperoleh dalam KMB, yaitu efek ditundanya penyelesaian masalah Irian Barat satu tahun kemudian. Terhambatnya penyelesaian Irian Barat karena faktor perbedaan persepsi masing-masing negara, dan berakibat timbulnya ketegangan-ketegangan baru yang mempengaruhi kebijaksanaan politik luar negeri kedua negara. Berawal dari sinilah

rentetan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah Indonesia yang berkaitan dengan hubungan diplomatik Indonesia-Belanda.

Lazimnya hubungan antarnegara diwarnai oleh pasang surut dan kebijakan politik luar negeri masing-masing negara. Politik luar negeri tiap negara adalah lanjutan dan merupakan refleksi dari politik dalam negeri. Konflik Irian Barat selain menjadi ganjalan hubungan diplomatik kedua negara, juga mengancam perdamaian dunia saat puncak persaingan perang dingin. Dengan keterlibatan internasional, konflik Irian Barat menjadi sangat kompleks dan banyak faktor kepentingan yang berpengaruh didalamnya.

Atas dasar gambaran di atas, artikel ini mengkaji beberapa permasalahan. Pertama, bagaimana sejarah pembebasan Irian Barat dari segi perjuangan diplomasi, karena secara realitas awal dan akhir perjuangan pembebasan Irian Barat ditentukan lewat jalur perundingan damai (*peace-keeping operations*), meskipun pada momen tertentu juga didukung oleh perjuangan militer. Kedua, dinamika politik apa yang terjadi dalam perjuangan pembebasan Irian Barat, secara internal di dalam negeri Indonesia dengan maraknya gerakan “solidaritas nasional” dan secara eksternal fenomena semakin kuatnya dukungan internasional. Dengan begitu apakah ada kekuatan politik global yang ikut bermain dalam perjuangan diplomasi membebasan Irian Barat, bagaimana itu berlangsung dan pengaruhnya terhadap penyelesaian konflik Irian Barat? Ketiga, adakah *micro agents* dalam proses pembebasan Irian Barat, mengapa dan bagaimana kekuatan itu berjuang?

II. METODE

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah kritis, yaitu meliputi empat tahapan kegiatan yang diawali dari heuristik (pengumpulan sumber), kritik interen dan eksteren, interpretasi atau sintesis dan historiografi. Dalam hal melakukan kritik perlu

mencermati, apakah data-data yang berasal dari sumber arsip ada kesesuaian dengan tema atau materi penulisan, dan bagaimana kaitan sumber satu dengan lainnya, apakah ada manipulasi data atau fakta sejarah yang sesuai dengan sumber penulisan tersebut.⁴

Heuristik adalah kegiatan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah, berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Sumber-Sumber sejarah ini terdiri dari sumber-sumber primer dan sekunder. Pengumpulan sumber primer dilakukan di pusat atau lembaga arsip yang dalam hal ini adalah Arsip Nasional RI, Departemen Luar Negeri, dan Perpustakaan Nasional. Adapun sumber yang diperoleh antara lain: Khasanah arsip Roeslan Abdulgani 1950-1976, Arsip Kabinet Presidensil 1950-1959, dan Arsip Kabinet Perdana Menteri 1950-1959. Juga dilengkapi sumber sejarah lisan, hasil wawancara dengan pelaku sejarah, seperti tokoh Sunario dan Roeslan Abdulgani.

Kritik sumber, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menyelidiki dan menguji apakah sumber-sumber sejarah yang ditemukan itu bisa dipercaya (kredibel) baik dalam bentuk fisik maupun isi informasinya. Tahap berikutnya adalah interpretasi, yaitu kegiatan menetapkan makna dan saling hubungan antara fakta-fakta sejarah yang telah diperoleh melalui kritik sumber. Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu kegiatan mensintesis fakta sejarah, atau menyajikan hasil penelitian dalam bentuk kisah sejarah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari konstruksi fakta sejarah yang berkaitan dengan dinamika politik Indonesia dalam perjuangan diplomasi pembebasan Irian Barat, dapat ditemukan beberapa isu penting dan menarik yang akan dibahas lebih lanjut berikut ini.

3.1. Munculnya Konflik Indonesia-Belanda dalam Masalah Irian Barat

Permasalahan konflik Irian Barat antara Indonesia-Belanda tidak akan lepas dari fakta-fakta historis kolonialisasi yang terjadi

di wilayah ujung timur Indonesia itu. Wilayah Irian Barat yang luasnya tiga kali Pulau Jawa atau dua belas kali luas negeri Belanda telah menjadi perhatian dunia setelah penjelajahan orang-orang Eropa abad 16. Persaingan perebutan koloni Irian Barat sesama bangsa Eropa akhirnya jatuh ke tangan kekuasaan Belanda sampai pertengahan abad 20 ketika terjadi pembebasan oleh Indonesia tahun 1963.

Ketika menjelang Proklamasi Indonesia, 17 Agustus 1945, Irian Barat menjadi perdebatan dalam rapat-rapat untuk penentuan batas wilayah Negara Indonesia. Dalam perdebatan soal wilayah Irian Barat di Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Bulan Juli 1945, tercatat ada kubu yang pro dan kontra dimasukkannya wilayah Irian Barat dalam kerangka Indonesia Merdeka. Kubu yang kontra diwakili oleh Moh. Hatta, dengan dalil bertentangan atas hak penentuan nasib sendiri setiap bangsa, dan menjadikan negara yang imperialis dan ekspansionis. Pihak yang pro Irian Barat dimasukkan ke dalam Republik Indonesia, dipelopori oleh Soekarno dan Moh. Yamin dengan dasar pertimbangan strategis politis yang menilai Irian Barat penting sebagai pintu gerbang memasuki kawasan Pasifik dan dengan masuknya wilayah itu memberikan dampak yang besar bagi kehidupan ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan.⁵ Penentuan status wilayah Irian Barat akhirnya ditentukan oleh voting yang hasilnya memilih Irian Barat bergabung dengan Indonesia. Hal ini berdasarkan putusan sidang BPUPKI atas wilayah Indonesia yang mencakup seluruh bekas Hindia Belanda dari Sabang sampai Merauke.⁶

Tuntutan Indonesia juga dikuatkan dengan munculnya gerakan-gerakan menentang kolonialisasi setelah Indonesia merdeka tahun 1945 di Irian Barat. Gerakan-Gerakan yang dipimpin oleh Silas Papare itu diwujudkan bentuk organisasi politik dengan nama "Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII)", 30 Nopember 1946 di Serui. Salah satu tujuan perjuangan PKII

ialah menuju kemerdekaan seluruh Indonesia, termasuk Irian Barat yang menjadi bagian wilayah Indonesia.⁷ Walaupun organisasi politik Irian itu tidak begitu populer dan dalam skala kecil, namun mempunyai peran besar sebagai senjata bagi diplomat-diplomat Indonesia sebagai alasan mengapa Irian Barat harus menjadi bagian dari Indonesia yang tidak terpisahkan.

Gerakan politik di Irian Barat menentang kolonialis Belanda dalam perkembangannya pecah menjadi dua kelompok, yaitu yang pro Indonesia menganggap sebagai bagian NKRI dan yang menentang integrasi dengan Indonesia dan lebih condong untuk mendirikan negara Papua merdeka. Gerakan yang mendukung bergabung dengan Indonesia dipelopori oleh Silas Papare dilihat dari konteks peranannya sebagai pejuang pro Republik Indonesia yang pernah mengalami tekanan-tekanan dari pemerintah kolonial Belanda sebelumnya. Untuk gerakan yang menginginkan negara Papua merdeka, dipelopori oleh seorang Indo-Belanda, Johan Ariks, yang mendesak kepada Badan Pengurus Umum Gabungan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia (GAPKI) memperjuangkan pendirian dan kemauan rakyat *Nieuw Guinea* asli umumnya.⁸ Akan tetapi apa yang diperjuangkan oleh Ariks dan kelompoknya ternyata tidak seperti harapan sebenarnya karena dalam langkah perjuangannya di-*backing* Belanda dengan tujuan melemahkan tuntutan Indonesia terhadap Irian Barat di kemudian hari. Selain itu rakyat yang bergabung dalam PKII menolak usul kolonialisasi Irian Barat oleh Indo-Belanda, yang dianggap tidak mewakili dari rakyat Japen Waropen atau Irian Barat pada umumnya, dan tidak punya suara yang mewakili Irian Barat. Akhirnya PKII mendesak kepada GAPKI memperjuangkan pendirian dan kemauan rakyat Irian Barat asli yang ingin bergabung dengan Negara Indonesia Serikat.⁹

Sebenarnya, sebelum dihasilkan putusan KMB telah ada suara-suara untuk membatalkan konferensi itu karena ada sebagian golongan dari pihak Indonesia yang menilai Indonesia telah didikte oleh Belanda

dengan memaksakan kehendak untuk sebuah perundingan yang ditentukan sendiri di Belanda. Apalagi dalam hasil perundingan itu Indonesia dipaksa menjadi negara serikat dan masih terikat dengan Belanda setelah dibentuknya suatu ikatan Uni Belanda-Indonesia, yang tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi Indonesia. Apalagi dengan tidak berhasil memasukkan Irian Barat dalam RIS berarti suatu kegagalan bagi Indonesia untuk memperjuangkan keutuhan Republik Indonesia. Kelompok yang dipelopori oleh golongan sosialis ini menilai pemerintah Hatta lemah terhadap tuntutan Belanda. Seharusnya Indonesia diakui kedaulatannya sejak Proklamasi Indonesia 17 Agustus 1945, tidak berupa penyerahan kedaulatan, yang berarti tidak mengakui akan keberadaan Republik Indonesia yang pada masa itu bersedudukan di Yogyakarta. Selain itu, dengan masih dikuasainya Irian Barat, berarti Indonesia belum 100 persen merdeka. Namun, kelompok pemerintah yang diwakili oleh Moh. Hatta yang didukung oleh kelompok Masyumi dan kaum nasionalis, berdalih bahwa dengan diakuinya kedaulatan Indonesia oleh Belanda dan sekutunya berarti Indonesia telah diakui keberadaannya, yang sebelumnya secara hukum belum diterima atau diakui secara internasional. Perkara Irian Barat masih menjadi ganjalan sehingga ditunda satu tahun kemudian untuk bisa diselesaikan di kemudian hari. Prinsip utama ialah Indonesia telah mendapat status sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

3.2. Konflik Irian Barat dan Dampaknya terhadap Kebijakan Politik Luar Negeri 1950-1958

Strategi Belanda dalam mempertahankan Irian Barat dari upaya klaim Indonesia muncul ketika penyelesaian satu tahun kemudian yang menyangkut wilayah itu tidak tercapai. Berbagai kebijakan dan strategi telah ditempuh Belanda untuk menguatkan posisinya di Irian Barat di mata dunia internasional, terlihat seperti pernyataan bahwa Irian Barat berbeda dengan wilayah

Indonesia lainnya baik menyangkut segi geografis dan etnis. Belanda lebih berhak karena telah membangun atau memerintah wilayah Irian Barat lebih dahulu daripada Indonesia. Juga yang lebih penting lagi, menurut dalil Belanda Irian Barat akan dijadikan atau dijanjikan negeri yang mempunyai pemerintahan sendiri. Upaya Belanda itu lebih dikenal dengan “Dekolonialisasi Irian Barat” yaitu strategi untuk memulihkan kolonialisasi Belanda di Irian Barat dengan kedok membangun tanah Irian Barat.

Upaya kolonialisasi Belanda di Irian Barat di antaranya dengan politik kultur, yaitu memaksa penggunaan bahasa Belanda dalam kegiatan resmi maupun tidak resmi, walaupun bahasa Melayu/ Indonesia telah sejak lama dipergunakan penduduk asli untuk hubungan dengan dunia luar. Begitu juga Belanda telah menyiapkan pembelajaran politik bagi penduduk asli Irian Barat dengan maksud untuk mendukung keberadaan dan memperkuat jajahannya di wilayah tersebut, seperti tokoh-tokoh Markus Kaisepo, Nicolas Youwe, Herman Wayoi, dan Johan Ariks. Mereka selain dididik untuk terlibat langsung dalam dunia politik yang berkaitan dengan soal Irian Barat, juga didorong untuk anti terhadap Indonesia dalam usaha pembebasan Irian Barat.¹⁰

Selanjutnya Belanda merencanakan memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam konstitusi Kerajaan Belanda sebagai dasar hukum dan legitimasi untuk memperkuat posisinya di wilayah itu. Akhirnya Belanda pada tanggal 23 Agustus 1956 mengubah undang-undang dasarnya secara sepihak, dengan memasukkan Irian Barat sebagai salah satu wilayah kerajaan. Perubahan itu yang pada Tahun 1948 berbunyi “*Het Koninkrijk der Nederlanden omvat het grondgebied van Nederland, Indonesie, Suriname en de Nederlandse Antille*”, menjadi berbunyi “*Het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden omvat Nederland, Suriname, de Nederlandse Antillen en Nederlands Nieuw-Guinea*” pada Tahun 1956.¹¹

Upaya Belanda untuk mempertahankan Irian Barat selain itu, ialah melakukan kegiatan subversi di Indonesia, dengan jalan menyusup dalam gerakan-gerakan separatisme, seperti Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), Andi Azis, dan Republik Maluku Selatan (RMS). Tujuannya ialah membuat kondisi pemerintah Indonesia yang tidak stabil, sehingga dinilai tidak layak memerintah Irian Barat yang masih muda daripada pemerintah Belanda yang lebih mapan.

Apa yang menjadi kebijaksanaan pemerintah Belanda untuk tetap mempertahankan Irian Barat, ternyata tidak didukung sepenuhnya oleh sebagian elemen masyarakat Belanda. Dalam opini publik masyarakat Belanda, kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah, antara lain datang dari *Partij v.d. Arbeid* dan *Christelijk Historische Unie*. Suara Donker dari *Partij v.d. Arbeid* mengemukakan bahwa Irian merupakan bagian Indonesia yang merupakan kelanjutan dari bekas Hindia Belanda. *Partij v.d. Arbeid* menyayangkan banyaknya korban yang sia-sia selama perlawanan dengan Indonesia yang menuruti nafsu pimpinan Belanda (Van Mook) untuk menguasai kembali jajahan Hindia Belanda.¹² Kedua, pendapat Tilanus dari *Christelijk Historische Unie* yang mengutip pidato Persiden Sukarno tanggal 17 Agustus 1951, yang dinilai bisa merusak persahabatan Indonesia dengan Belanda, yang disebabkan oleh ulah lah Belanda yang tetap mempertahankan Irian Barat. Lebih lanjut menurutnya, dengan berdasarkan cinta kasih, Republik Indonesia telah tunduk atas keputusan KMB yang ditelan pahit, karena Irian tidak termasuk bersama-sama dalam kemerdekaan yang diakui. Menurut partai ini penjajahan atas Irian Barat telah merusak hubungan baik antara Indonesia dan Belanda.

Pemaparan dengan menampilkan sikap golongan masyarakat Belanda terhadap konflik Irian Barat disengaja dengan maksud untuk memperlihatkan sisi lain di luar pemerintah Belanda dalam menyikapi konflik Irian Barat. Terlihat di sini bahwa tidak semua elemen masyarakat Belanda

mendukung kebijakan pemerintah Belanda soal Irian Barat. Ini yang sebenarnya menjadi salah satu kendala gagalnya Belanda untuk menguasai Irian Barat. Hal yang kontradiktif berbeda dalam masyarakat Indonesia, walaupun banyak terjadi perbedaan pandangan politik, namun menyangkut klaim pemerintah Indonesia atas wilayah itu semua elemen masyarakat mendukung, baik secara moral maupun materiil.¹³

Perjuangan Indonesia untuk membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda walaupun diwarnai dengan jatuh bangunnya kabinet dan berbagai kekacauan di daerah, tetap berlanjut terutama lewat jalur perjuangan diplomasi. Berbagai perundingan bilateral yang diadakan antara Pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Belanda dalam tahun 1950 sampai tahun 1954, namun telah mengalami kegagalan. Belanda juga tidak bersedia berunding dengan Indonesia yang menyinggung masalah Irian Barat.

Belanda menunjukkan sikap pertentangan yang semakin tajam dengan Indonesia dengan mulai memasukkan Irian Barat ke dalam rencana undang-undang, kepada parlemen Kerajaan Belanda tahun 1952. Selain itu juga, Belanda telah menahan beberapa pimpinan Irian Barat yang mengadakan aksi terhadap pemerintah Belanda. Tindakan tersebut membuat hubungan kedua negara mulai tegang dan Indonesia menganggap sia-sia saja menjalin persahabatan dengan Belanda.¹⁴

Dampak kegagalan perundingan secara bilateral dengan Belanda menyangkut penyelesaian Irian Barat. Indonesia telah mulai mengurangi volume hubungan kerjasama kedua negara. Sehubungan dengan itu, pada tahun 1954, Indonesia memutuskan hubungan Uni Belanda-Indonesia, dan tahun 1956 dibatalkan. Juga semua ikatan kerjasama kedua negara dihentikan, serta status hubungan menjadi hubungan internasional saja. Selanjutnya untuk mengimbangi pemerintah kolonial Belanda di Irian Barat, dibentuk Propinsi Irian Barat Tahun 1956 dengan kedudukan sementara di Soa Siu, Propinsi Maluku.

Dengan adanya reaksi-reaksi dalam negeri Indonesia akibat sikap penolakan Belanda untuk menyelesaikan masalah Irian Barat, Panitia Aksi Pembebasan Irian Barat, pada tanggal 5 Desember 1954 mengadakan rapat akbar yang dihadiri ribuan massa, dan mengajukan resolusi untuk mendesak pemerintah untuk pertama, memasukkan Irian Barat secara unilateral ke dalam wilayah Indonesia dan menyatakan kekuasaan Belanda di wilayah Indonesia sebagai agresi; kedua segera membentuk pemerintahan Propinsi Irian Barat sebagai jawaban atas tindakan-tindakan pemerintah kolonial dan memutuskan hubungan diplomatik.¹⁵

3.3.Strategi Diplomasi Perjuangan Pembebasan Irian Barat

Upaya Belanda untuk membawa konflik Irian Barat ke Mahkamah Internasional pada tahun 1951 telah ditolak oleh pihak Indonesia. Posisi Belanda di Irian Barat baik secara *de jure* maupun secara *de facto* lebih kuat dibandingkan Indonesia yang terlebih dulu menguasai dan membangun wilayah tersebut. Dengan strategi memanfaatkan kondisi munculnya “Perang Dingin” dan wacana dunia saat itu yang menghendaki dihapuskannya imperialisme dan kolonialisme di muka bumi, Indonesia berusaha memperjuangkan Irian Barat lewat penggalangan atau dukungan internasional.

Usaha Indonesia untuk memperoleh dukungan internasional dalam rangka memperjuangkan Irian Barat, mulai ditempuh lewat forum Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955. Indonesia mulai memasukkan permasalahan Irian Barat sebagai perjuangan dari sisa-sisa kolonialisme dan imperialisme dunia, yang menjadi isu utama waktu itu. Hasilnya, Indonesia mendapat dukungan dan spirit dalam memperjuangkan pembebasan Irian Barat dari kolonialisme Belanda. Dukungan dan spirit dari peserta KAA itu membuka jalan bagi Indonesia untuk memperjuangkan masalah Irian Barat di forum organisasi internasional PBB.

Usaha Indonesia untuk membawa persoalan Irian Barat ke forum PBB mendapat reaksi keras dan penolakan dari pihak Belanda. Belanda menganggap bahwa PBB tidak berhak atau tidak *competent* ikut campur dalam persoalan Irian Barat, dan menilai Indonesia melakukan ekspansi karena menyalahafsirkan mengenai hasil KMB. Walaupun begitu, akhirnya Indonesia berhasil membawa masalah Irian Barat di forum internasional tersebut. Perdebatan soal Irian Barat di forum Sidang umum PBB mulai dari tahun 1954 sampai Tahun 1956 mengalami kegagalan, karena tidak memenuhi forum persetujuan 2/3 anggota yang hadir. Atas kegagalan di forum PBB itu strategi perjuangan Indonesia dalam membebaskan Irian Barat berubah dari diplomasi secara damai menjadi diplomasi tekanan dengan konfrontasi di segala bidang.

Kegagalan usaha-usaha penyelesaian secara damai konflik Irian Barat melalui perundingan-perundingan, baik dengan bilateral maupun lewat perantaran PBB, telah menyebabkan perubahan sikap perjuangan Indonesia yaitu dari defensif ke ofensif; dari meminta Belanda untuk berunding, menjadi memaksa Belanda untuk berunding:

*“We would no longer ask the Dutch to negotiate, but would be able to force them to negotiate with us, both because of the situation abroad and Indonesia’s relations with foerign countries”.*¹⁶

Indonesia kemudian menjalankan politik konfrontasi total terhadap Belanda, bukan saja secara politis tetapi juga secara ekonomis dan militer. Tindakan-tindakan tegas diambil terhadap kepentingan-kepentingan ekonomi Belanda di Indonesia, antara lain menasionalisasikan perusahaan-perusahaan Belanda. Menyangkut hubungan luar negeri, Indonesia melakukan tindakan sepihak dengan memutuskan hubungan diplomatik dengan negeri Belanda Tahun 1960. Tindakan tersebut merupakan upaya tekanan terhadap Belanda agar mau segera menyelesaikan masalah Irian Barat dan

dikembalikannya wilayah itu kepada Indonesia.

3.4. Pembebasan Irian Barat di Era Demokrasi Terpimpin, 1959-1963

Dengan pergantian sistem pemerintahan dari demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin tahun 1959, arah perjuangan pembebasan Irian Barat menjadi radikal. Jika sistem pemerintah sebelumnya banyak ditentukan di meja perundingan yang ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet yang berkuasa, maka sejak tampilnya Soekarno, sebagai pengendali utama pemerintahan, arah perjuangan pembebasan Irian Barat banyak ditentukan oleh manuver-manuver strategi diplomasi dengan kekuatan militer.

Presiden Sukarno mempunyai keyakinan bahwa pemerintah Belanda tidak berhasrat untuk menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui perundingan dan cara-cara damai. Soekarno menyimpulkan bahwa Indonesia hanya akan dapat memperoleh Irian Barat melalui cara-cara yang menegangkan dan eksplosif. Cara ini akan melibatkan negara-negara besar, dan akan memberikan hasil yang positif. Alat pertama yang dipakai untuk melaksanakan strategi itu ialah Perserikatan Bangsa Bangsa.¹⁷

Pada pidato pertemuan di Sidang Majelis Umum PBB yang kelima belas Tahun 1960, di hadapan para pemimpin dunia, Presiden Sukarno mengajukan tantangan kepada pemerintah Belanda, bahwa Indonesia bertekad bulat untuk membebaskan Irian Barat dengan cara apapun. Dalam pidatonya yang berjudul "Membangun Dunia Kembali", strategi Soekarno telah berhasil untuk mendapatkan simpati dunia, terutama menyangkut penghapusan kolonialisme dan imperialisme di dunia, termasuk masalah Irian Barat. Banyaknya simpati dari pidato Soekarno, ada yang sangat terkesan untuk bertemu, yaitu PM Harold Mac Millan dari Inggris dan Pangeran Norodom Sihanouk dari Kamboja. Efek pidatonya itu yang sangat berarti ialah undangan dari Kerajaan Inggris

kepada Soekarno, karena bagaimanapun ada kekecewaan Belanda pada sekutunya itu yang besimpati pada musuh.

Meskipun dunia internasional mulai bersimpati pada perjuangan Indonesia, Belanda justru membangun kekuatan militernya di Irian Barat. Pemerintah Belanda mengadakan *move-move* politik dengan mengundang utusan peninjau dari PBB untuk menyaksikan pelantikan Dewan Papua ciptaan Belanda di Irian Barat dengan maksud mendirikan sebuah negara Papua merdeka. Terhadap hal ini pemerintah Indonesia mengatakan bahwa tiap urusan atau misi yang dikirim ke Irian Barat tanpa persetujuan Indonesia dianggap sebagai tindakan ilegal, dan tidak bersahabat.¹⁸ Lebih lanjut, Indonesia telah membangun angkatan perangnya, yang menjadi terbaik di seluruh Asia Tenggara setelah menerima bantuan persenjataan dari Blok Timur.

Pada saat puncak konflik Irian Barat, karena terpojok oleh simpati dunia internasional terhadap *claim* Indonesia atas Irian Barat, Belanda mengadakan manuver membentuk negara Papua merdeka di Irian Barat. Juga dengan membentuk seperangkat unsur untuk sebuah negara, seperti menentukan nama negara menjadi *West Papua*, bangsa Papua, bendera Bintang Kejora dan lagu kebangsaan Papua "Hai Tanahku Papua". Lebih lanjut Menlu Belanda, Joseph Luns, mengajukan usul kepada PBB mengenai dekolonisasi wilayah *Nieuw Guinea*.¹⁹ Atas tindakan itu membuat kemarahan dari pihak Indonesia terutama Presiden Sukarno dan mencap usaha Belanda itu sebagai memperkuat kolonialisme dan imperialisme.

Sebagai Panglima Tertinggi Militer, Soekarno dengan melihat situasi di Irian Barat, bahwa rakyat Irian bersama Belanda telah menaikkan bendera Papua dan menyanyikan lagu kebangsaan Papua serta persiapan lain menuju kemerdekaan *de jure*. Maka pada peringatan hari proklamasi 17 Agustus 1961, dengan terang-terangan Soekarno menjawab ancaman Belanda itu dengan mengadakan konfrontasi total pembebasan Irian Barat yang lebih dikenal dengan "Trikor". Isi Trikora yaitu:

Gagalkan pembentukan Negara Boneka Papua buatan Belanda, Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia, dan mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa. Selanjutnya atas tindakan itu dibentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang akan merencanakan dan melaksanakan operasi militer terhadap Belanda.

Sementara itu dengan gagalnya Indonesia memperoleh persenjataan militer dari Amerika Serikat (AS), telah berakibat condongnya haluan politik Soekarno (Indonesia) ke arah Blok Timur (komunis), dan mendapat dukungan yang luas dari seluruh lapisan masyarakat maupun pemimpin dan organisasi-organisasi massa.²⁰ Dari sini, arah kebijakan politik Indonesia menyangkut pembebasan Irian Barat juga berubah, dari diplomasi damai lewat organisasi internasional PBB berhaluan ke arah diplomasi konfrontasi dengan kekuatan militer dan isu perang dingin.

Strategi diplomasi melalui pemanfaatan situasi perang dingin yang dijalankan Indonesia pada mulanya dilakukan ketika jalur diplomasi secara damai penyelesaian Irian Barat dengan Belanda tidak membawa hasil. Indonesia menyadari bahwa dibelakang Belanda ada kepentingan yang sangat besar yang berpengaruh, yaitu AS dengan Blok Baratnya yang selalu mendukungnya. Sedangkan di Blok Timur ada Uni Soviet (US) sebagai kekuatan rivalnya. Untuk itu awal strategi diplomasi Indonesia ialah mendekati diri pada negara-negara Komunis (US dan Eropa Timur) yang sedang mengekspansi ideologi komunisme di dunia untuk memperoleh dukungan agar memenangkan suara terbanyak dalam konflik Irian Barat di Sidang Umum PBB.²¹ Akan tetapi, akhirnya mendapat dukungan dari negara-negara Blok Komunis, pada tingkat akhir perjuangan dalam resolusi SU PBB 1957, gagal karena tidak mencapai forum dua per tiga suara anggota sidang.

Tindakan Indonesia tidak berhenti sampai di situ, dengan aksi Presiden Soekarno untuk mengadakan lawatan ke

berbagai negara yang sangat berpengaruh, seperti ke AS, US dan Republik Rakyat Cina (RRC) telah memperoleh dampak yang positif bagi perjuangan pembebasan Irian Barat. Kunjungan Soekarno ke AS, atas anjuran Dubes AS, Cumming, meskipun dapat memberi sedikit manfaat atas pandangan AS pada Indonesia, telah membuat kecewa Sukarno karena dalam kunjungan itu tidak diterima secara baik. Hal ini karena telah tertanam dalam hati Presiden AS, Eisenhower, sikap anti Soekarno yang dianggap sangat komunis. Namun kunjungan selanjutnya ke US dan RRC mendapat sambutan yang luar biasa layaknya pemimpin besar dunia. Dengan maksud untuk menanamkan pengaruh ideologinya di kawasan Asia Pasifik, negosiasi pembelian persenjataan dan bantuan ekonomi disetujui oleh pihak Moskow. Kunjungan balasan Indonesia diterima secara baik oleh US, sebaliknya AS telah menolak kunjungan balasan dari Indonesia. Hal ini merupakan kesalahan besar AS karena saat itu Indonesia telah berpaling ke Timur (Uni Soviet) dan segala macam kekuatan baik bidang sosial-ekonomi, politik dan militer diarahkan ke Blok Timur. Puncak dari hubungan itu ditandai pembelian secara besar-besaran persenjataan militer dari negara-negara Blok Timur. Dengan demikian ada pembagian keuntungan kedua belah pihak, Indonesia memperoleh kekuatan persenjataan modern untuk menghadapi Belanda di Irian Barat, pihak US memperoleh pengaruh ideologinya di Indonesia yang condong ke Timur.

Tindakan Indonesia yang berpaling ke negara komunis ini sangat mengkhawatirkan negara-negara Barat dan Amerika Serikat, John F. Kennedy, Presiden AS pengganti Eisenhower pada bulan Januari 1961, mulai menandingi pengaruh Uni Soviet di Indonesia dengan mengupayakan tercapainya penyelesaian atas Irian Barat melalui perundingan secara damai yang ditengahi sendiri oleh AS, maupun juga dengan strategi intelijen. Reaksi AS ini juga dilatarbelakangi oleh pandangan baru mereka bahwa pergolakan yang telah terjadi di Indonesia, yang juga melibatkan AS,

sebenarnya bukan karena masalah komunis atau anti komunis, namun lebih disebabkan oleh rasa ketidakadilan antara pusat dan daerah. Dengan diampuninya seorang serdadu AS, Allan Pope, yang menyusup ke Indonesia dengan pemboman yang dilakukannya di Maluku, menandakan pemerintah Indonesia tidak otoriter. Namun yang juga diperhatikan AS adalah orang-orang yang berada di belakang Soekarno yang sebagian besar berhaluan sosialis komunis. Untuk itu harus ada kekuatan yang menandinginya dengan jalan mencari simpati terhadap penyelesaian Irian Barat.

Perkembangan lebih lanjut pada bulan Februari 1962, Presiden Kennedy mengutus adiknya, Jaksa Agung Robert F. Kennedy melobi Indonesia dan pergi ke negeri Belanda untuk bertindak sebagai penengah dalam perundingan itu. Rangkaian perundingan yang pertama dilaksanakan pada bulan Maret 1962 tidak dapat menghasilkan kesepakatan, sehingga dengan emosi yang membara (Trikor), jumlah orang Indonesia menyusup ke Irian Barat semakin meningkat. Akan tetapi menyusul perundingan-perundingan baru yang ditengahi Amerika Serikat.

Akhirnya pada tanggal 15 Januari 1963, tercapailah suatu penyelesaian atas konflik Irian Barat. Pihak Belanda sepakat menyerahkan wilayah itu kepada UNTEA, suatu pemerintahan sementara PBB di Irian Barat yang selanjutnya akan menyerahkan Irian barat kepada Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Dengan demikian sesungguhnya keberhasilan perjuangan pembebasan Irian Barat merupakan keberhasilan diplomasi Indonesia dengan strategi kekuatan militer yang melibatkan kekuatan internasional, yaitu persaingan ideologi Kapitalisme Barat dan Komunisme Blok Timur.²²

IV. SIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut. Pertama, perjuangan Indonesia dalam diplomasi membebaskan Irian Barat dari kekuasaan Belanda adalah peristiwa sejarah

yang multikompleks. Diawali dengan strategi diplomasi damai sampai diplomasi secara ofensif, dari peristiwa pemutusan hubungan Uni Indonesia-Belanda sampai Trikor pembebasan Irian Barat, dan dari keterlibatan unsur nasional sampai berdampak pada skala internasional. Kedua, dengan tertundanya penyelesaian Irian Barat dari keputusan hasil KMB, berakibat munculnya peristiwa-peristiwa penting, baik berskala nasional maupun internasional, seperti; Konperensi Asia Afrika, kebijakan nasionalisasi perusahaan Belanda, gerakan aksi pembebasan Irian Barat, terseretnya Indonesia dalam perang dingin, perubahan orientasi politik luar negeri RI. Dengan demikian pengaruh Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet yang bermain di belakang peristiwa itu, berpengaruh terhadap percepatan proses penyelesaian Irian Barat dengan kemenangan di pihak Indonesia. Ketiga, *Micro agens* sejarah dalam peristiwa konflik Irian Barat telah memberi andil positif pada opini internasional terhadap klaim nasional Indonesia itu.

CATATAN

¹Lihat Nasution, *Mengamankan Pandji-Pandji Revolusi* (Jakarta, 1964), ham. 38.

²Dalam misi AH Nasution ke Soviet untuk negosiasi pembelian peralatan militer telah berhasil disetujui pembelian senjata sebesar 250 juta dollar AS antara lain terdiri dari: 12 buah kapal selam, helikopter dan peralatan berat amfibi untuk KKO 3 resimen, jet tempur MIG-21, Ilyusin 28, TU-16, pesawat angkut Antonov, 3 satuan pertahanan udara dengan roket dan radarnya. Dari pembelian persenjataan itu, kekuatan militer Indonesia menjadi terbesar di Asia Tenggara dan nomor tiga di Asia. Lihat A.H.Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas*, Jilid 5 (Jakarta: CV Mas Agung, 1989), hlm. 51

³Sikap Presiden AS, Kennedy terhadap pemerintah Belanda yang dikemukakan oleh Schlesinger dalam bukunya *A Thousand Days*. Lihar Ganis Harsono, *Cakrawala Politik Era Sukarno* (Jakarta: Inti Idayu Press, 1985), hlm. 152

⁴Mengenai hal ini mengacu antara lain pada: Sartono Kartodirdjo, "Metode Penggunaan Bahan Dokumenter", dalam buku Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1989), dan Kuntowidjoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003).

⁵Pernyataan Moh. Yamin ini terangkum dalam khasanah arsip Mohammad Yamin no. 53 berjudul, *Irian, Pulau Sengketa*, Juni 1950), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

⁶Lihat juga arsip Moh. Yamin nomor 56 Bab II menyangkut, *Dasar Hukum Kedudukan Indonesia Dalam Hal Irian Barat*, dalam Retjana Pembangunan Irian Barat oleh Dewan Perantjang Nasional, 19 Agustus 1962, ANRI.

⁷Dari khasanah arsip Sekretariat Negara RI, nomor 854, ANRI.

⁸Sumber Arsip *Delegasi Indonesia* nomor.1502, ANRI.

⁹Lihat *Resolusi Rakyat Nieuw Guinea*, dalam khasanah arsip Sekretariat Negara RI no. 854, ANRI.

¹⁰Peter Savage, *From Nationalism to National Liberation in West Irian* (Sydney: CIET, Oktober 1977), hlm. 30.

¹¹Perubahan ini dimuat dalam *Nederlands Staatsblad* 1956/436 dan diumumkan pula dalam *Gouvernementsblad van Nederlands Nieuw-Guinea* 1956/ 57., Gie hlm. 19.

¹²Uraian lebih jelas lihat "Warta Rapat Pusat Badan Perjuangan Irian", dalam arsip Sekretariat Negara, Nomor 854, ANRI.

¹³Dukungan ini terlihat dari berbagai resolusi baik dari ormas. atau orpol, yang mendukung Perjuangan Pembebasan Irian Barat, dan sumbangan-sumbangan emas atau berupa uang dari masyarakat. Lihat bundel arsip surat-surat di Arsip Kabinet Presiden RI nomor 1719, ANRI.

¹⁴Dalam nota balasan Indonesia kepada Belanda pada pembukaan Konferensi Indonesia-Belanda di Den Haag tanggal 29 Juni 1954, merundingkan rencana pembubaran Uni Belanda-Indonesia dan hendak menghentikan lain-lain perjanjian hasil KMB yang merugikan negara. Lihat khasanah *Arsip Kabinet Presiden RI* nomor inv.425, ANRI.

¹⁵Ada puluhan Resolusi-Resolusi masyarakat Indonesia yang mendukung pembebasan Irian Barat baik organisasi massa maupun organisasi politik, seperti Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI),

Persatuan Pemuda TRIP, Komite Aksi Pembebasan Irian Barat, PKI, Persatuan Bekas Pedjuang Bersendjata, Konperensi Wanita Indonesia, PNI, Masyumi, NU, dll., dari tahun 1951-1958. Lebih lengkapnya lihat Khasanah *Arsip Konstituante* nomor 157, Arsip Nasional RI.

¹⁶Subandrio, *Indonesia on the March*, Vol. II (Departement of Foreign Affairs, Republic of Indonesia, tanpa tahun), hlm. 93.

¹⁷Ganis Harsono, *Cakrawala Politik Era Sukarno* (Jakarta: Inti Idayu Press, 1985), Hlm. 118

¹⁸*Ibid.*, hlm. 138.

¹⁹Decki Natalis Pigay BIK, *Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm. 219.

²⁰Dalam khasanah Arsip *Muhammad Yamin* nomor inventaris 53 terdapat banyak pernyataan baik dari organisasi massa maupun politik, seperti PKI, PNI, SOBSI, Parkindo, Pemuda Rakyat yang mendukung sikap politik Sukarno itu, ANRI.

²¹Lihat Mortimer, Rex, *Indonesian Communism under Sukarno: Ideology dan Politics, 1959-1965* (Oxford University Press; Cornell University Press, 1974), hlm. 298.

²²Decki Natalis Pigay BIK, *Op. Cit.*, hlm. 105.